



**PEMERINTAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)
TAHUN 2021**



Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 26 Tahun 2021



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 26TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 maka RKPD tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 dan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);

11. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 158);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2021 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
 - a. pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - b. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - c. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Perubahan PPAS.
 - d. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - e. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD disusun berpedoman pada:

1. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022; dan
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Agustus 2021
BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 515

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 semester I, menunjukkan perlu penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman untuk menyusun perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk Tahun Anggaran 2021. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Pringsewu Tahun 2021. Pedoman ini disusun agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistic dan berkelanjutan dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan OPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 mengacu kepada Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, yaitu :

PRINGSEWU BERDAYA SAING, HARMONIS, DAN SEJAHTERA
(BERSAHAJA)

Selanjutnya dalam rangka untuk mewujudkan Visi Pringsewu Bersahaja tersebut maka ditetapkan Misi pembangunan di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

1. Misi Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik dan Permukiman Secara Merata.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Terutama infrastruktur yang memiliki kualitas tinggi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

2. Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter.

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya proses pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter.

3. Misi Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat.

Kabupaten Pringsewu ditahbiskan sebagai lumbung pangan Provinsi Lampung, Namun perkembangan daerah yang pesat menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah transit dan sekaligus penyangga. Karena itu sektor perdagangan, jasa dan industri kecil dan menengah perlu dikelola secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Misi Memperkuat Kualitas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sebagai daerah yang berbasis tanaman pangan dengan pembangunan yang cepat, memerlukan tindakan yang bijaksana untuk tetap mempertahankan lahan-lahan produktif, mengoptimalkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, serta memberdayakan masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah.

5. Misi Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat.

Pelayanan publik menjadi focus dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat akan meningkat. Dibutuhkan kinerja aparatur yang profesional dengan penataan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Prinsip *good and clean governance* harus menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, yang di dukung dengan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah tersebut, selanjutnya di operasionalkan kedalam tujuan dan sasaran yang mudah untuk diukur. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2022, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.01
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik dan Permukiman Secara Merata.	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur publik dan permukiman	Tersedianya jaringan jalan, jembatan, sarana pemerintahan dan infrastruktur publik yang merata dan berkualitas.
			Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang berkualitas
			Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten.
			Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dan nyaman
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya.	Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata
			Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
			Meningkatnya pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial
			Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk
			Meningkatnya kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya
3.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat.	Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat.	Berkembangnya sarana dan prasarana perekonomian masyarakat pada pusat pertumbuhan primer, skunder dan tersier
			Meningkatnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
			Meningkatnya daya saing pariwisata
			Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

No	Misi	Tujuan	Sasaran
4.	Memperkuat Kualitas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.	Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil pertanian dan peternakan
			Meningkatnya produksi perikanan secara berkualitas
			Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas
			Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
5.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima
			Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas
			Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan aman

Sumber : RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Pringsewu, RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, Rancangan RKP, Rancangan RKPD Provinsi Lampung, permasalahan di Kabupaten Pringsewu, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2021 adalah:

”Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM yang Berkarakter Menuju Pemulihan Ekonomi dan Tatanan Sosial Baru”

Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia saat ini mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai hal. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Pringsewu, dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu melakukan penyesuaian target indikator kinerja daerah yang terpengaruh oleh kondisi pandemi ini. Prioritas, sasaran daerah, indikator sasaran, target dan penyesuaian target tersebut selanjutnya dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.02
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021
Pada RPJMD Tahun 2017-2022

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET							
	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur publik dan permukiman	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan & pengendalian tata ruang yang konsisten	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	74,00		Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase ketersediaan peta digital dan analog tata ruang	55.50	55.50							
							Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	74.00	70.25							
	Tersedianya jaringan jalan, jembatan, sarana pemerintahan & infrastruktur publik yang merata dan berkualitas	Prosentase jalan kabupaten kondisi mantab	70,00		70,00		Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun/ditingkatkan(Km)	120.50	15.0						
								Panjang jalan yang dipelihara/ direhabilitasi/ direkonstruksi (km)	17.5	17.5						
								Persentase kondisi Jalan kabupaten dalam kondisi baik	70.00	55.5						
								Jumlah jembatan yang dibangun (buah)	1	1						
								Jumlah jembatan yang dipelihara/ direhabilitasi/ direkonstruksi (bh)	2	2						
								Panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang dibangun (m)	2,500	2,500						
								Prosentase gedung Pemerintahan yng terbangun	92,50		92,50		Penataan Bangunan Gedung	Jumlah gedung negara yang terbangun (unit)	3	1
														Jumlah fasilitas publik yang terbangun (unit)	2	1
Prosentase sarana kebinamargaan dalam kondisi baik	100	100														

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase pemenuhan tenaga lokal jasa konstruksi yang bersertifikat	67,5	67,5
						Pengembangan Permukiman	Prosentase konektivitas wilayah strategis dan cepat tumbuh	73,5	70,5
						Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	65,0	60,0
							Volume pembangunan turab sungai dan sumber daya air lainnya (m2)	1000	250
		Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman & perumahan yang berkualitas	Prosentase pemukiman kumuh	6,50		Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	82,50	75,50
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan layanan air limbah (SR)	200	170
			Prosentase rumah layak huni	92,50		Pengembangan Perumahan	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	82,50	80,0
								Prosentase perbaikan perumahan akibat bencana	100
						Kawasan Permukiman	Prosentase pemukiman yang tertata	72,50	70,25
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase drainase lingkungan perkotaan dalam kondisi baik (tidak tersumbat)	77,50	72,50
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase rumah tangga memiliki akses air bersih	78,75	78,0	

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
		Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dan nyaman	Angka kecelakaan lalu lintas (kali)	40		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan	80	65,0
							Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	70	65,0
							Prosentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	87,5	57,0
							Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	26000	22,500
							Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum	65	63,0
							Prosentase penerangan jalan negara dan jalan provinsi	77,5	70,0
							Prosentase penerangan lampu taman dan ruang terbuka publik	82,5	77,0
	Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata	- Angka Harapan Lama Sekolah - Rata-rata Lama Sekolah	13.81 8.36		Pengendalian Perizinan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan	Rasio murid PAUD terhadap anak usia 4-6 tahun	94,5	94,5
							Angka Partisipasi Kasar SD	113,5	113,5
							Angka Partisipasi Kasar SMP	97,00	97,00
							Angka Partisipasi Murni SD/MI	99,2	100,0
							Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	81,5	81,5
							Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 – 12 Tahun	100	100
							Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 13 – 15 Tahun	96,61	96,61
							Angka putus sekolah SD/MI	0,20	0,10
							Angka putus sekolah SMP/MTs	0,80	0,30

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
							Cakupan pembinaan LPK	87,50	88,50
							Prosentase kelulusan Paket A	94,00	97,20
							Prosentase kelulusan Paket B	95,00	95,50
							Prosentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikasi	90,00	60,00
							Prosentase guru SMP/MTs yg telah memiliki sertifikasi	85,25	50,25
							Prosentase akreditasi A pada SD/MI	16,50	15,0
							Prosentase Akreditasi A pada SMP/MTs	35,50	30,50
							Prosentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	82,50	75,00
							Prosentase ruang kelas SMP/ MTs kondisi bangunan baik	80,00	75,00
						Pembinaan Perpustakaan	Prosentase pengelola perpustakaan yang telah memperoleh sertifikat kompetensi perpustakaan.	70,25	77,00
							Prosentase sekolah yang telah memiliki perpustakaan	94,15	87,50
							Prosentase pekon yang telah memiliki perpustakaan.	35,75	35,75
						Pengelolaan Arsip	Prosentase petugas arsip (arsiparis) yang telah memperoleh sertifikat kompetensi kearsipan	83,50	83,50
						Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Prosentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan	84,30	84,30
							Prosentase sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar.	60,50	60,50

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET			
		Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,52		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100,00	100,00			
							Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan tingkat dasar (jiwa)	226.790	226.790			
							Cakupan masyarakat miskin yg terlayani jaminan kesehatan tingkat lanjut.	16.166	16.166			
							Persentase balita gizi kurang	0,02	0,01			
							Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	98,50	95,00			
							Prosentase Puskesmas yang telah terakreditasi	100,00	100,00			
							Persentase terpenuhinya sarana & prasarana Rumah Sakit Type C sesuai standar.	97,50	93,60			
							Angka Kematian Ibu per 1.000 KH.	0,06	0,06			
							Angka Kematian Bayi per 1,000 Kelahiran Hidup	5,15	5,15			
							Rasio Dokter Umum per 100,000 penduduk	23	19			
							Rasio Dokter Spesialis per 100,000 penduduk	15	15			
							Rasio Perawat per 100,000 penduduk	150	145			
							Rasio Bidan per 100,000 penduduk	125	125			
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				Prosentase kecukupan SDM kesehatan pada Puskesmas PONED	98,00	97,50
										Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan.	100,00	100,00

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET				
							Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	42	42				
							Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	700	700				
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan kejadian kasus penyakit atau resiko terinfeksi HIV/ AIDS per 1000 penduduk	22	22				
							Cakupan Pelayanan Kasus Penyakit Diabetes Mellitus Per 1,000 penduduk	143.187	130550				
							Cakupan Pelayanan Kasus Penyakit Hipertensi per 1,000 penduduk.	143.187	130550				
							Cakupan pembiayaan kesehatan (kk)	24002	22175				
						Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT	60,50	55,50				
						Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	80,50	80,50				
							Prosentase Kelurahan dan desa yang melaksanakan STBM	85,50	83,50				
		Meningkatnya pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.	Prosentase penanganan PMKS	77,25		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	77,25	77,25				
											Prosentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	91,5	94,00
											Prosentase warga miskin yang mendapat bantuan perlindungan sosial	60,00	60,00

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Penanganan Bencana	Prosentase korban bencana yg menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00
							Prosentase penyandang cacat dan lansia yang mendapat alat bantu.	82,25	80,0
						Rehabilitasi Sosial	Prosentase penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan	67,50	63,0
						Pemberdayaan Sosial	Prosentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang melaksanakan SOP sesuai standar.	80,00	77,50
		Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	Indeks Pembangunan Gender	94,55		1. Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 3. Perlindungan Perempuan 4. Peningkatan Kualitas Keluarga	Partisipasi angkatan kerja perempuan	60,00	55,70
			Laju pertumbuhan penduduk	1,03		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase kecamatan yang telah membentuk forum anak	100,00	100,00
						Perlindungan Khusus Anak	Prosentase forum anak yg aktif (melakukan kegiatan minimal 3 kali dalam 1 thn)	88,89	75,0
						Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,07	0,73

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET				
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase peserta KB aktif	79,00	77,00				
							Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	2,40	10,50				
							Total Fertility Rate (TFR)	2,36	2,0				
							Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan.	57,50	57,50				
							Rasio ketergantungan penduduk.	1,96	1,96				
							Prosentase Posyandu yang aktif	92,50					
		Meningkatnya kapasitas pemuda prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya	Prestasi olahraga tingkat nasional (atlit)	18		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Prosentase organisasi pemuda yang aktif.	52,50	88,20				
											Cakupan lembaga kepemudaan yang memperoleh bantuan.	57,30	50,00
											Prosentase wirausaha muda yang mendapat bantuan	75,00	70,00
							Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	10,00	57,50			
				Prosentase group seni budaya daerah yang aktif	67,50		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	8	8			
											Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	9
											Cakupan grup seni dan budaya yang mendapatkan pembinaan	77,50	65,00

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET	
	Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Berkembangnya sarana dan prasarana perekonomian masyarakat pada pusat pertumbuhan primer, skunder dan tersier	Pendapatan per kapita penduduk (ADHB) (Rp. Juta)	27,18		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	% peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan yg tertib ukur.	60,00	55,00	
							Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	% fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	85,00	81,06
							Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal	10,00	10,00
				Angka Kemiskinan (%)	9,50		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	% peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	40,00	33,75
				Pengeluaran per kapita (Rp. Juta)	10.807,92		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	% usaha industri yang menerapkan SNI	65,50	60,00
								Cakupan bina kelompok pengrajin	45,00	40,00
							Perencanaan dan Pembangunan Industri	% sentra industri kecil yang berkembang	50,00	45,00
								% sentra industri unggulan daerah yang mendapatkan fasilitasi pendukung.	90,00	80,00
							Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	% koperasi aktif	50,50	48,50
							Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	% Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi usaha menengah	17,50	15,00
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	% Usaha Mikro & Kecil terhadap Usaha Menengah	86,50	86,50		

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Administrasi Pemerintahan Desa	% BUMDes yang dikelola dengan baik	68,70	68,00
							% Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	78,25	70,00
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	% pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	55,50	64,00
		Meningkatnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Prosentase peningkatan nilai investasi (Rp. Milyar)	4.068,49		Promosi Penanaman Modal	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	5	5
						Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi daerah (PMA dan PMDN)	4.068,49	17,806
						Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45	86,45
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase pengaduan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti.	77,25	80,00
		Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan (Orang)	30.000		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	30000	30000
						1. Pemasaran Pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Prosentase destinasi wisata yang telah dikelola dgn baik	70,00	50,00

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET					
		Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,14		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	85	85					
						Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,00	67,00					
						Hubungan Industrial	% pekerja atau buruh yang menjadi peserta Jamsostek	55,50	55,50					
							% lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi standar.	87,50	85,00					
						Pembangunan Kawasan Transmigrasi	% transmigran yang mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya.	87,50	87,50					
							% calon transmigran yg diberangkatkan pada daerah tujuan transmigrasi	45,50	23,50					
	Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil pertanian & peternakan	Produktifitas padi pertahun (Ku/ha)	59,15		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi padi per tahun	160.200	160.200					
							Produktivitas padi per tahun	59,15	59,15					
				Tingkat ketersediaan Daging (Ton)			1990			Produksi jagung per tahun	30.500	42.833		
												Produktivitas jagung per tahun	53,00	53,00
												% Jaringan Irigasi Desa dan Jutut dalam kondisi baik	73,75	73,75
												% kelompok tani yang memperoleh bantuan alsintan.	67,50	67,50
												% ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani.	87,50	87,50
												% luas lahan pertanian yang telah teridentifikasi sebagai LP2B	77,78	77,78

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
							Produksi Kakao per tahun	3.352	3.000
							Produksi Tembakau per tahun	82,90	70,00
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase kelompok tani yg menerapkan pengendalian penyakit tanaman secara alami	40,50	35,00
							Jumlah kelompok tani yang melakukan integrasi usaha pertanian	11	11
							Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian (KWT)	9	9
						Penyuluhan Pertanian	Prosentase klasifikasi Poktan tingkat lanjut dan madya.	67,50	67,50
							Prosentase penerapan teknologi pertanian dan peternakan pada kelompok tani	45,00	45,00
							Prosentase peningkatan populasi sapi dan kerbau.	15,00	15,00
							Prosentase peningkatan populasi kambing	15,00	15,00
							Prosentase peningkatan populasi unggas	20,00	20,00
							Produksi telur per tahun	5.750	8888
						Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kesakitan Ternak Sapi/Kerbau dan Kambing.	21,00	21,00
							Jumlah unit usaha pangan asal hewan yg bersertifikat NKV	9	7

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah ternak sapi yang ikut asuransi usaha ternak sapi (ekor)	250	250
							Jumlah bibit ternak hasil IB (Inseminasi Buatan)	4.950	6.531
							% kelompok tani yang mendapat bantuan bibit unggul	75,50	65,50
							Luas tanam padi sawah yang ikut asuransi usaha tanaman pangan	3.500	3.000
		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas	Pola Pangan Harapan (Skor)	91,50		Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan	Ketersediaan energi mencapai 2,400 kkal/kapita/hari	3160	4066
						Penanganan Kerawanan Pangan	% daerah (pekon) rawan pangan.	13,00	13,00
						Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	% cadangan pangan Pemerintah Daerah (100 ton ekuivalen beras)	87,50	87,50
							% cadangan pangan masyarakat (500 kg beras per pekon)	76,34	76,34
							Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,50	91,50
							Coefisien Variasi (CV) harga pangan pokok&penting <10%	< 10%	4,17%
							Pengawasan Keamanan Pangan	% Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan	87,50

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
		Meningkatnya produksi perikanan secara berkualitas	Tingkat konsumsi ikan (Kg/Kapita/ Tahun)	25,72		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Ikan Hasil Budidaya dan Tangkap per tahun (ton)	8405	8405
						Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan bina kelompok budidaya ikan (%)	85,00	85,00
						Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/ Tahun)	25,72	25,72
						Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (Ton)	535	535
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap dokumen Amdal/ UKL UPL/ SPPL	87,50		Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah.	50,00	47,00
						1. Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,16	58,00
						3. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 4. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase pencemaran status mutu air	25,00	25,00

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan (Amdal/ UKL UPL/ SPPL) yg dilaksanakan dengan baik	73,00	73,00
						2. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan data / informasi SDA dan LH yang dapat diakses	100,00	100,00
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase taman yang telah dikelola dengan baik.	100,00	100,00
	Tata Kelola Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,45		Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45	86,45
						Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,75	98,75
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan	86,45	86,45
						Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase ketersediaan database kependudukan yang valid	87,50	87,50
						Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00	94,00
						Kepegawaian Daerah	Prosentase ASN yg kenaikan pangkatnya tepat waktu	100,00	100,00
					Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat fungsional.		8,25	8,25	
					Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis.		45,50	45,50	

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase pejabat pengawas yang telah mengikuti Diklat PIM IV	83,33	83,33
							Prosentase pejabat administrator yang telah mengikuti Diklat PIM III	84,00	84,00
							Prosentase pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengikuti Diklat PIM II	70,97	70,97
							Cakupan bina keluarga anggota KORPRI berpangkat rendah	25,00	25,00
						Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan penetapan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda	100,00	100,00
							Prosentase anggota DPRD yng mengikuti diklat/bimtek	100,00	100,00
							Prosentase hasil kunjungan kerja yang dapat di implementasikan.	80,00	70,00
							Prosentase hasil reses yang diakomodir RKPD	82,50	80,00
						Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan kantor pemerintahan kelurahan/pekon yang baik.	87,79	85,00
							Prosentase perangkat pekon yang mendapat pelatihan.	75,50	70,50
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan kedinasan kepala daerah.	100,00	100,00
							Prosentase pelayanan kedinasan wakil kepala daerah.	100,00	100,00
						Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah penerbitan Peraturan Daerah.	5	5

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
							Jumlah penerbitan Peraturan Kepala Daerah	15	15
							Prosentase penataan batas wilayah antar kabupaten	57,25	52,75
						Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase penyampaian laporan TEPRAs tepat waktu	100,00	100,00
							Laju inflasi Kabupaten Pringsewu	≤ 5 %	≤ 5 %
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Capaian pelayanan administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	94,70	94,70
							% Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada Perangkat Daerah	88,50	88,50
							Jumlah ASN pada Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek.	500	400
		Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Prosentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan e-government	91,43		Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase pekon telah mampu mengoperasikan e-gov.	91,60	75,50
							Prosentase aparatur pengelola website SKPD yg mendapat pelatihan.	75,00	72,50
							Prosentase rutinitas Rapemda dalam menyiarkan programnya.	80,25	80,00
							Prosentase SKPD yang aktif updating terhadap websitenya.	85,00	82,75
						Aplikasi Informatika	Prosentase pemasangan wifi pada area publik.	70,00	67,75
						Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase pekon yang telah tertib pengelolaan keuangan melalui IT	92,50	92,50

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan buku Pringsewu Dalam Angka	ada	ada
							Ketersediaan Buka Produk Domestik Regional Bruto (PDRE)	ada	ada
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Prosentase pemenuhan sarana prasarana sandi sesuai standar	65,50	50,50
						Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase publikasi kegiatan Pemerintah Daerah yang bersifat positif.	87,00	100,00
							Prosentase publikasi kegiatan DPRD yang bersifat positif.	87,50	100,00
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Maturiti SPIP (Level)	4		Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang telah di tindak lanjuti	87,50	95,50
							Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK dan Provinsi) yang telah di tindak lanjuti	92,50	100,00
						Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan tim saber pungi dalam melaksanakan pembinaan.	75,00	88,75
							Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)	4	4
						Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Baik	Baik
							Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	B	B

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	100,00	100,00
		Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) (Kategori)	B		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase konsistensi antara program RKPD dengan RPJMD	100,00	100,00
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP			Prosentase ketersediaan data/ informasi	82,50	82,50
							Prosentase aparatur perencana perangkat daerah yang telah dilatih.	85,00	75,00
							Persentase indikator kinerja sasaran RPJMD yang mencapai target	100,00	100,00
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang ekonomi	97,50	97,50
							Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya dan pemerintahan	97,50	97,50
							Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Prasarana wilayah dan sumber daya alam	97,50	97,50
							Prosentase realisasi dokumen Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	82,50	82,50

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang ditindak lanjuti	16,50	16,50
						Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah	95,00	96,95
							Penyusunan & penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100,00	100,00
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase penatausahaan asset daerah yang baik	90,00	90,00
						Pengelolaan Pendapatan Daerah	% realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	85,00	35,00
							Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	10,79	10,00
		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan aman	Angka kriminalitas	0,14		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pengurus ormas yang mendapat wawasan kebangsaan	40,00	450,00
						1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka kriminalitas	0,14	0,10

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.	77,00	84,00
						Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penegakan Peraturan Daerah	82,50	82,50
							Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3)	87,50	87,50
						Penanggulangan Bencana	Prosentase pembentukan desa siaga bencana	95,00	15,30
							Prosentase penanganan rehabilitasi/ rekonstruksi darurat bencana.	100,00	100,00
							% tingkat kecukupan stok logistik dalam menghadapi darurat bencana	100,00	100,00
							Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten.	60,50	50,00
						Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	97,50	92,50
						Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase tempat peribadatan yang mendapat bantuan	20,00	20,00
							Cakupan guru agama non formal yang mendapat bantuan	40,00	40,00

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET RPJMD 2021	PENYESUAIAN TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PENYESUAIAN TARGET
						Penatagunaan Tanah	Prosentase penyelesaian konflik pertanahan	90,00	90,00

Keterangan: Nama Program sudah disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel. 4.03
 Prioritas dan Sasaran Daerah Serta Arah Kebijakan
 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu
 Tahun 2021

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
1.	Pemantapan infrastruktur pelayanan dasar & pengembangan wilayah strategis;	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik secara berkualitas	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	60%	Dinas PUPR
			Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase rumah tangga memiliki akses air bersih	78%	Dinas PUPR
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	47,00%	Dinas PUPR
			Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Layanan Air Limbah (SR)	200 SR	Dinas PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase drainase lingkungan perkotaan dalam kondisi baik (tidak Tersumbat)	72,50%	Dinas PUPR
			Pengembangan Permukiman	Prosentase konektifitas wilayah strategis dan cepat tumbuh	70,50%	Dinas PUPR
			Penataan Bangunan Gedung	Prosentase Gedung Negara yang Terpelihara dgn Baik	100%	Dinas PUPR
			Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Presentase Fasilitas Publik yang terpelihara dengan baik	77,50%	Dinas PUPR
			Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan yg dipelihara/ direhabilitasi/ direkonstruksi	17,50 Km	Dinas PUPR
			Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase pemenuhan Tenaga lokal jasa konstruksi yang bersertifikat	67,50%	Dinas PUPR
			Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase ketersediaan peta digital dan analog tata ruang	55,50%	Dinas PUPR
			Pengembangan Perumahan	Prosentase perbaikan perumahan akibat bencana alam	100%	Dinas PUPR
			Kawasan Permukiman	Prosentase pemukiman yang tertata	70,25%	Dinas PUPR

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
			Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dgn PSU	80.00 %	Dinas PUPR
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	65.00 %	Dinas Perhubungan
2.	Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan kejadian kasus penyakit atau resiko terinfeksi HIV/AIDS per 1,000 penduduk	22	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan.	100%	Dinas Kesehatan
			Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT	55,50%	Dinas Kesehatan
			Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	80,50 %	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 s.d 12 tahun	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio murid PAUD terhadap anak usia 4 s.d 6 tahun	94,50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Kebudayaan	Cakupan grup seni & budaya yg mendapatkan pembinaan	65,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Perpustakaan	Prosentase pekon yang telah memiliki perpustakaan	35,75%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pengelolaan Arsip	Prosentase sarana & prasarana kearsipan sesuai standar	60,50%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Prosentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan	84,30%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
3.	Pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktifitas perekonomian masyarakat dan berdaya saing	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (orng)	85 Orang	Disnakertrans
			Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67%	Disnakertrans
			Hubungan Industrial	Prosentase lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi standar	85,00%	Disnakertrans
			Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase calon transmigran yang diberangkatkan pada daerah tujuan transmigrasi	23,50%	Disnakertrans
			Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan energi mencapai 2,400 kkal/kapita/hari	4066 kkal/kapita/hari	Dinas Ketahanan Pangan
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase cadangan pangan Pemerintah Daerah (100 ton ekuivalen beras)	87.50%	Dinas Ketahanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase daerah (pekon) rawan pangan	13,00%	Dinas Ketahanan Pangan
			Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	87,50%	Dinas Ketahanan Pangan
			Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase perangkat pekon yang mendapat pelatihan	70.50%	Dinas PMP
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat & Masyarakat Hukum Adat	Prosentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	64.00%	Dinas PMP
			Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	48.50%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil Menjadi Usaha Menengah	15.50%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil yang terhadap usaha menengah	86.50%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitas pasar milik pemerintah daerah	81,06%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan		

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
				dalam kondisi baik		
			Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Prosentase peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	33,75%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan yg tertib ukur	60%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok perdagangan atau usaha informal	10%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase sentra industri kecil yang berkembang	45%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan bina kelompok pengrajin	40%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Prosentase wirausaha muda yang mendapat bantuan	70%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga	57,50%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase destinasi wisata yg telah dikelola dengan baik	50%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	30.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Ikan Hasil Budidaya dan Tangkap	8405 ton	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan bina kelompok budidaya ikan	85%	Dinas Perikanan
			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	25,72 Kg/Kapita/Tahun	Dinas Perikanan
			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	535 ton	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase peningkatan populasi unggas	20%	Dinas Pertanian

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase luas lahan pertanian yang telah teridentifikasi sebagai LP2B	77,78%	Dinas Pertanian
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kesakitan ternak Sapi/Kerbau dan Kambing	21%	Dinas Pertanian
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase kelompok tani yang menerapkan pengendalian penyakit tanaman secara alami	35,00%	Dinas Pertanian
			Penyuluhan Pertanian	Prosentase penerapan teknologi pertanian dan peternakan pada kelompok tani	45%	Dinas Pertanian
4.	Pemantapan harmonisasi masyarakat dan lingkungan hidup	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan selaras dengan lingkungan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	87,50%	Badan Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanggulangan Bencana	Prosentase pembentukan desa siaga bencana	15.30%	BPBD
			Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	92,50%	BPBD
			Pemberdayaan Sosial	Prosentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang melaksanakan SOP sesuai standar	77,50%	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial	Prosentase penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan	63,0%	Dinas Sosial
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase warga miskin yang mendapat bantuan perlindungan sosial	60%	Dinas Sosial
			Penanganan Bencana	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100%	Dinas Sosial

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
				selama masa tanggap darurat		
			Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tanggal (KDRT)	0,01	Dinas PPPAPP & KB
			Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase kecamatan yang telah membentuk forum anak	100%	Dinas PPPAPP & KB
			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tanggal (KDRT)	0,01	Dinas PPPAPP & KB
			Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase forum anak yang aktif (melakukan kegiatan minimal 3kali dalam 1 tahun)	75,00%	Dinas PPPAPP & KB
			Perlindungan Khusus Anak	Prosentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapat perlindungan	100%	Dinas PPPAPP & KB
			Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase izin lingkungan (Amdal/ UKL UPL/ SPPL) yg dilaksanakan dengan baik	73,00%	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	74,00%	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase taman yang telah dikelola dengan baik	100%	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pencemaran status mutu air	25,00%	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase ketersediaan data/ informasi SDA dan LH yang dapat diakses	100%	Dinas Lingkungan Hidup
			Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	74,50%	Dinas Lingkungan Hidup
			Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang	74,50%	Dinas Lingkungan Hidup

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
				memenuhi baku mutu		
			Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase izin lingkungan (Amdal/ UKL UPL/ SPPL) yg dilaksanakan dengan baik	73,00%	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah	47,00%	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Pemantapan kualitas pelayanan publik & reformasi birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan efisien	Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,73%	Dinas PPPAPP & KB
			Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase peserta KB aktif	77,00%	Dinas PPPAPP & KB
			Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rasio ketergantungan penduduk	1,96%	Dinas PPPAPP & KB
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan	4 kerjasama	Sekretariat Daerah
			Perekonomian dan Pembangunan	Laju inflasi Kabupaten Pringsewu	≤ 5 %	Sekretariat Daerah
			Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98.75 %	Dinas Dukcapil
			Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran	94.00 %	Dinas Dukcapil
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan	86.45 %	Dinas Dukcapil
			Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase database kependudukan yang valid	87.50 %	Dinas Dukcapil
			Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase SKPD yang aktif updating terhadap websitenya	82.75 %	Dinas Kominfo
			Aplikasi Informatika	Prosentase pemasangan wifi pada area publik	67.75 %	Dinas Kominfo
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan buku Pringsewu Dalam Angka	Ada	Dinas Kominfo
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Prosentase pemenuhan sarana prasarana sandi	50,50%	Dinas Kominfo

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
				sesuai standar		
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	17.806 Rp (Milyar)	Dinas PMPTSP
			Promosi Penanaman Modal	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	5	Dinas PMPTSP
			Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45 %	Dinas PMPTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	80,00 %	Dinas PMPTSP
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	4.068,49 Rp (Milyar)	Dinas PMPTSP
			Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan penetapan peraturan daerah berdasarkan Prolegda	100%	Sekretariat DPRD
			Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase konsistensi antara program RKPD dengan RPJMD	100%	Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya dan pemerintahan	97,50%	Bappeda
			Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi dan pengembangan inovasi daerah yang ditindaklanjuti	16,50%	Bappeda
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase realisasi peningkatan Pendapat Asli Daerah	35%	Bapenda
			Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD yang tepat waktu	100%	BPKAD

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase penatausahaan aset daerah yang baik	90%	BPKAD
			Kepegawaian Daerah	Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis	45,50%	BKPSDM
			Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengikuti Diklat PIM II	70,97%	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang telah di tindaklanjuti	95,50%	Inspektorat
			Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan tim saber pungli dalam melaksanakan pembinaan	88,75%	Inspektorat
			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	94,70%	Kecamatan
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	27,5%	Kecamatan
			Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	0,10%	Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3)	87,50%	Kecamatan
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kantor pemerintahan kelurahan/pekon yang baik	87,79%	Kecamatan
			Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pengurus ormas yang mendapat wawasan kebangsaan	40%	Kesbangpol

No	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OPD PENGAMPU
			Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	84%	Kesbangpol
			Pemerdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pengurus ormas yang mendapat wawasan kebangsaan	45%	Kesbangpol
			Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Angka Kriminalitas	0,10	Kesbangpol
			Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Angka Kriminalitas	0,10	Kesbangpol
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota	Prosentase Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah	94,70%	Seluruh OPD

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2021 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam upaya penanganan dampak Wabah Covid-19.
2. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2021.
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Provinsi sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Pringsewu 2021 pada dasarnya disusun dengan menterjemahkan suatu proses pemikiran strategis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Pringsewu yang telah disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan propinsi, serta sejalan dengan agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi terutama peningkatan ekonomi kerakyatan pada tahun 2021.

Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 dan capaian tahun 2020 maka sasaran makro ekonomi yang hendak dicapai Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 adalah:

Tabel 4.04
Penyesuaian Sasaran Makro Ekonomi
Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

No.	U r a i a n	Target 2021	Penyesuain/ Perubahan Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,5 - 4,5	1,5 - 2,5
2.	Tingkat Inflasi	2,4 - 4,0	2.00 - 3.00
3.	Tingkat Kemiskinan	11.00 - 10.00	9,50 -10,00
4.	Tingkat Pengangguran	4.0 - 3.8	5,50 - 5,75
5.	IPM	69,50 - 70,00	70,30 - 71,00
6.	Angka Harapan Hidup	70,00	70,00
7.	Pendapatan Perkapita	26.25 Jt - 27.27 Jt	25.5 Jt - 26.5 Jt
8.	Gini Ratio	0,32 - 0,31	0,33 - 0,32

Tabel 4.05
Sandangan Sasaran Makro Pembangunan Nasional-Provinsi Lampung dan
Kabupaten Pringsewu dalam Perubahan RKPD 2021

INDIKATOR	NASIONAL		RKPD PROV LAMPUNG		RKPD PRINGSEWU	
	Sasaran RKP 2021	Sasaran Perubahan RKP 2021	Sasaran RKPD 2021	Sasaran Perubahan RKPD 2021	Sasaran RKPD 2021	Sasaran Perubahan RKPD 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5	NA	4,7 - 5,7	2,5 - 3,5	3,5 - 4,5	1,5 - 2,5
Inflasi (%)	3,0	NA	3,0 + 1	02-Apr	2,4 - 4,0	2.00 - 3.00
PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	NA	NA	44 - 45	41 - 43	26.25 Jt - 27.27 Jt	25.5Jt - 26.5Jt
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,5 - 8,2	NA	6,3	4 - 4,5	4.0 - 3.8	5,50 - 5,75
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 - 9,7	NA	11 - 12,1	12,4 - 12,76	11.0 - 10.0	9,50 -10,00
IPM	72,78 - 72,90	NA	70,68	69,69 - 70	69,50 - 70,00	70,30 - 71,00
Indeks Gini	0,377 - 0,379	NA	032 - 0,33	0,310 - 0,334	0,32 - 0,31	0,33 - 0,32